

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Peningkatan konflik interkomunal setelah diterapkannya misi penjagaan perdamaian *United Nations - African Union Hybrid Operation in Darfur* (UNAMID) di Sudan merupakan sebuah fenomena konflik lanjutan yang terjadi di luar dari kendali misi penjagaan perdamaian PBB. Sebagai pihak yang menangani proses penjagaan perdamaian, segala bentuk pembinaan dan bantuan telah diterapkan demi meredam konflik yang terjadi baik antara kelompok bersenjata dengan pemerintah maupun antara kelompok-kelompok komunal. Namun, proses PBB dalam menciptakan kedamaian berkelanjutan di Sudan tidak hanya sampai kepada UNAMID saja, peluncuran misi bantuan politik yaitu *United Nations Integrated Transition Assistance Mission in Sudan* (UNITAMS) merupakan salah satu bentuk bantuan misi politik untuk Sudan dalam masa transisi ke pemerintahannya. Dalam masa pemerintahan transisi menuju pemerintah yang lebih demokratis, pemerintahan Sudan dibantu oleh UNITAMS saat mereka dalam keadaan yang rentan dalam bidang sosial, politik dan ekonominya. Situasi juga diperburuk oleh kehadiran pandemi COVID-19 yang berdampak besar bagi kelancaran bantuan kemanusiaan oleh komunitas internasional. Hal ini menimbulkan pembagian bantuan yang tidak merata ke seluruh daerah di Sudan yang menyebabkan tensi konflik antara masyarakat semakin meningkat.

Salah satu faktor besar yang membuat konflik interkomunal meningkat adalah karena ketidakpercayaan masyarakat Sudan terhadap pemerintahannya. Hal ini disebabkan karena pemerintah Sudan masih memiliki kaitan yang erat dengan rezim sebelumnya yang didominasi oleh kekuatan militer. Masyarakat Sudan khawatir bahwa perjuangannya dalam mencapai revolusi akan sirna ketika pemerintahan diambil alih lagi oleh kekuatan militer. Selain itu, pasukan-pasukan bawahan pemerintahan Sudan seperti *Rapid Support Forces* (RSF) didapati beberapa kali melanggar hak kemanusiaan yang berujung dengan timbulnya korban yang membuat kepercayaan masyarakat Sudan terhadap pemerintahan semakin

menurun. Penanganan konflik yang dapat dikatakan masih belum memadai ini digambarkan oleh meningkatnya jumlah *Internally Displaced persons* (IDPs) yang tersebar di seluruh daerah di Sudan seperti Darfur, Sudan Barat, Kordofan dan beberapa daerah lainnya yang terdampak oleh konflik interkomunal. Kerja sama yang dilakukan antara UNITAMS dan pemerintahan Sudan dalam transisi pemerintahannya mencakup permasalahan IDPs yang telah menjadi permasalahan panjang yang sejalan dengan peningkatan konflik interkomunal di Sudan.

Proses pembinaan perdamaian yang dilakukan oleh UNITAMS dan pihak-pihak komunitas internasional yang terlibat menggunakan konsep resolusi konflik ini mengikutsertakan faktor penting dalam pembinaan perdamaian yaitu tingkatan rumput alias masyarakat Sudan itu sendiri. Dengan melibatkan masyarakat baik dalam proses politik dan pembentukan kebijakan lainnya, potensi untuk mencapai kesepakatan yang setara akan lebih tinggi. Hal ini juga termasuk kepada keterlibatan perempuan serta pemuda dalam partisipasi politik yang dinilai sebagai faktor penting dalam pembinaan perdamaian. Hal tersebut juga didukung oleh mandat dari UNITAMS yang menekankan partisipasi politik oleh perempuan sebagai bentuk pembinaan perdamaian menuju Sudan yang lebih demokratis. Keterlibatan masyarakat sipil dalam ranah pemerintahan di Sudan memiliki sejarahnya sendiri. Seperti pembentukan *Forces of Freedom and Change* (FFC) yang berhasil menjadi wadah masyarakat sipil untuk memberikan suaranya dalam proses perpolitikan. FFC juga menjadi salah satu faktor berhasilnya Revolusi Sudan pada tahun 2019 yang melengserkan Omar Al-Bashir dari kekuasaannya. Dalam konsep resolusi konflik dan pembinaan perdamaian, hal ini dinilai merupakan salah satu kemajuan dalam menuju perdamaian berkelanjutan di Sudan.

Dengan melihat keadaan Sudan yang masih tergolong sebagai *Least Developed Country* (LDC), peranan dalam pembinaan perdamaian tidak hanya terletak pada pengembangan dan peningkatan kapasitas masyarakat sipil untuk dapat mengikuti pergerakan politik yang cukup kompleks di Sudan saja, melainkan bantuan internasional juga memiliki andil yang besar dalam prosesnya. Selain untuk menghindari meningkatnya potensi konflik interkomunal lanjutan, bantuan internasional juga dinilai dapat menjadi penyokong bagi Sudan dalam membangun kembali negaranya, khususnya dalam proses transisi pemerintahan, menilai biaya

yang dibutuhkan untuk membangun kembali tidak sedikit dan Sudan membutuhkan semua bantuan yang bisa mereka dapatkan. Dengan mengesampingkan hambatan seperti ketergantungan terhadap bantuan internasional, hal-hal seperti keterbatasan sumber daya yang disebabkan oleh buruknya proses penanganan konflik maupun dikarenakan bencana alam menjustifikasi pengadaan bantuan internasional terhadap Sudan. Oleh karena itu, kerja sama yang dilakukan baik dari UNAMID, UNITAMS dan pihak internasional lainnya menjadi bagian penting dalam mengatasi peningkatan konflik interkomunal demi menuju perdamaian berkelanjutan di Sudan.

Secara keseluruhan, Peneliti menemukan bahwa aspek-aspek yang menyebabkan meningkatnya konflik interkomunal di Darfur meskipun telah dilakukan penyebaran penjaga perdamaian tidak hanya terpaku pada perubahan di antara pemangku kepentingan, melainkan harus terdapat kesadaran dan perubahan dari bawah ke atas secara merata yang melibatkan partisipasi masyarakat. Perlu diketahui juga bahwa serangkaian kebijakan yang ditentukan akan memiliki dampak langsung yang luas bagi kehidupan masyarakat. Dengan kepergian penjaga perdamaian, sudah seharusnya terdapat resolusi konflik yang telah diterapkan untuk mengurangi potensi konflik lanjutan. Namun, peningkatan konflik interkomunal yang terjadi menggambarkan bahwa masyarakat masih memiliki ikatan dan kepercayaan yang kuat terhadap pasukan penjaga perdamaian dari PBB tersebut. Disamping penanganan yang kurang matang tersebut, PBB telah melancarkan operasi bantuan politik seperti UNITAMS yang telah menjadi aset penting dengan menjadi bagian pembinaan perdamaian di Sudan. Tanpa kehadiran UNITAMS sebagai mitra dalam membangun perdamaian dan bantuan bagi transisi pemerintahan, terdapat kemungkinan bahwa Sudan akan mengalami ledakan konflik yang menyebabkan instabilitas keamanan dan meningkatnya jumlah IDPs meskipun UNAMID telah melakukan tugasnya selama belasan tahun.

6.2 Saran

Saran praktis dari Peneliti terhadap keterkaitan berakhirnya misi penjagaan perdamaian UNAMID di Sudan mengharapkan bahwa pemerintah dapat menjadikannya sebagai momen pembangunan negara secara efektif daripada

mengandalkan peninggalannya sebagai suatu bentuk ketergantungan. Terlepas dari tugas UNAMID dalam mempromosikan perdamaian dan stabilitas di Darfur, pemerintahan Sudan sudah seharusnya dapat mengatasi akar penyebab konflik tanpa mengandalkan kehadiran UNAMID. Hal ini penting dilakukan untuk menghindari kekhawatiran yang akan ditimbulkan bahwa Sudan tidak dapat mempertahankan keuntungan yang diperoleh dari kehadiran UNAMID setelah misi perdamaian tersebut berakhir. Kehadiran UNITAMS juga menjadi sebuah oportunitas yang baik bagi masa depan Sudan, dengan aset-aset yang dimiliki oleh UNITAMS yang dapat membantu Sudan dalam mengatasi peningkatan konflik interkomunal serta membantu proses politik dan membuka kesempatan yang lebih besar untuk masyarakat sipil dalam mengikuti berbagai kegiatan politik sehingga masyarakat dapat memulihkan kepercayaan mereka terhadap pemerintah.

Secara akademis, dengan menulis penelitian mengenai peningkatan konflik interkomunal di Darfur setelah berakhirnya misi penjagaan perdamaian PBB, Peneliti berharap dapat memberikan sudut pandang yang berbeda atas fenomena tersebut. Penggunaan konsep resolusi konflik yang jauh lebih komprehensif dengan melibatkan tingkatan rumput atau masyarakat oleh operasi pemeliharaan perdamaian PBB yang selaras dengan *peacebuilding theory* menjadi salah satu hal yang dapat diandalkan dalam proses pembinaan perdamaian. Peneliti juga berharap dari hasil temuan penelitian ini, akan berguna bagi penelitian-penelitian yang akan datang dalam mengkaji keterkaitan operasi penjagaan perdamaian dengan konflik lanjutan yang terjadi di sebuah negara.